

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN
SWADAYA DI DESA PURWOBINANGUN KECAMATAN SEI BINGAI
KABUPATEN LANGKAT**

SKRIPSI

OLEH :

VENICA AGNES

218520006



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/12/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/12/25

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian : "Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Purwobinangun Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat"

Nama Mahasiswa : Venica Agnes

NPM : 218520006

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui oleh :

Dr. Drs. Indra Muda, M.AP

Dekan



Ketua Program Studi



Tanggal Lulus : 22 Agustus 2025

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam skripsi ini yang dikutip dari hasil karya orang lain sudah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma dan aturan penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi-sanksi dengan peraturan yang berlaku apabila di kemudian hari ditemukannya sifat plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 15 Januari 2025



REPUBLICA
SERPONG
10000
MENTERI
006ABANX070862358
Venica Agnes
218520006

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Venica Agnes
NPM : 218520006
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tugas Akhir/ Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalty Non-Ekslusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)DI DESA PURWOBINANGUN KABUPATEN LANGKAT”**. Dengan Hak Bebas Royalty Non-Ekslusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media / format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir, skripsi / tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 15 Januari 2025

Yang Menyatakan,



Venica Agnes 218520006

ABSTRAK

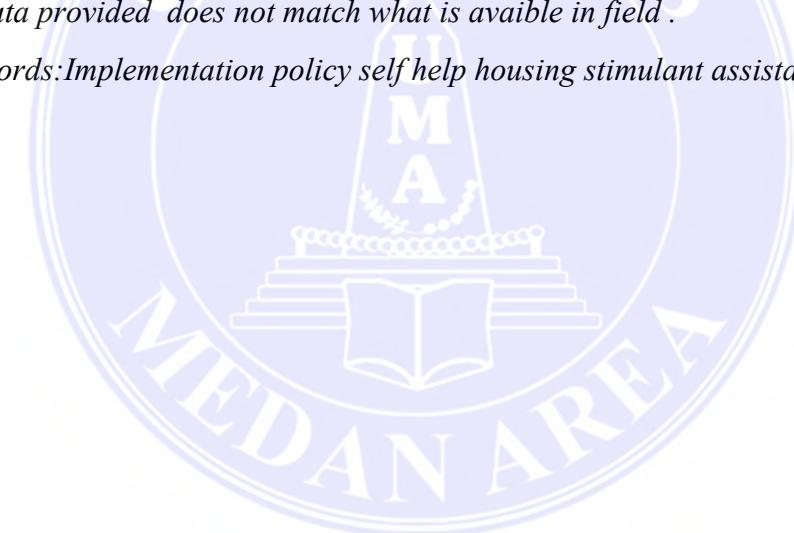
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah Program yang dibuat Pemerintah Melalui Kementerian PUPR yang ditujukan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki keterbatasan daya beli sehingga mendapat dukungan dari pemerintah untuk memperoleh bantuan rumah yang layak untuk di huni. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat atau mendeskripsikan bagaimana proses berjalannya Program BSPS yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Dinas PKP) di Desa Purwobinangun Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat dan untuk mengetahui apa-apa saja yang menjadi faktor penghambat didalam pelaksanaan program bantuan ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Adapun teori yang digunakan adalah Teori Implementasi dari Varn Meter dan Varn Horn. Adapun Penelitian ini menunjukkan bahwa Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Purwobinangun ini sudah terealisasikan cukup baik namun ada dua indikator yang belum terealisasikan dengan baik yakni Sumber Daya berupa Materi (Dana) Masyarakat Penerima bantuan kurang mampu untuk berswadaya, Data yang diberikan tidak sesuai dengan yang ada di lapangan.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

ABSTRACT

The self help housing stimulant assintance program(Bsps)is a program created by the government though the ministry of PUPR aimed at Low Income Communities (MBR) Who have limited purchasing power so that they receive support from the government to obtain assistance for housing that is suitable for living in the aim of this research is to see/ describe how the process of the BSPS program carried out by the department of housing and settlement areas (Dinas PKP)in Purwobinangun village sei bingai District,Langkat Regency and to find out what are the inhibiting factors in the implementation of this assistance program. The method used in this assistance program. The method used with a Qualitative approach the theory used is the implementation theory of van meter and van horn this research shows that the self -help housing stimulant assistance program in Purwobinangun village has been realized quite well but there are two indicators that have not been realized well namely resources in the form of materials (funds) the communities receiving the aid is less able to be self sufficient the data provided does not match what is available in field .

Keywords:Implementation policy self help housing stimulant assistance (BSPS)



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Venica Agnes yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Lahir pada tanggal 02 Februari 2002, berusia 23 tahun dari pasangan Bapak Virsan Gustian, S.T., M.Psi dan Ibu Enny Suhemmy. Penulis merupakan seorang Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Medan Area pada tahun 2021.

Penulis tamat dari SMP Negeri 3 Binjai pada tahun 2018 lalu melanjutkan sekolah Menegah Atas di SMK Tunas Pelita Binjai pada tahun 2018 dan lulus pada tahun 2021. Setelah lulus dari SMA penulis melanjutkan pendidikan di UNIVERSITAS MEDAN AREA pada tahun 2021-2025 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Administrasi Publik.



KATA PENGANTAR

Puji syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-NYA penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini. proposal skripsi ini merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana Sosial dan Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Adapun judul Skripsi ini adalah **IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI DESA PURWOBINANGUN KECAMATAN SEI BINGAI KABUPATEN LANGKAT**. Penulis skripsi yang dilakukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana jurusan admistrasi public pada fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Medan Area.

Terimakasih penulis sampaikan Kepada Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area. Dan penulis sampaikan Kepada Bapak Dr, Walid Musthafa S.S.Sos, M.IP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area dan . penulis sampaikan kepada Bapak Dr.Drs.Indra Muda M. AP Dosen Pembimbing yang selalu sabar dan sedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penulisan skripsi ini.

Medan, 15 Januari 2025

Penulis

Venica Agnes

DAFTAR ISI

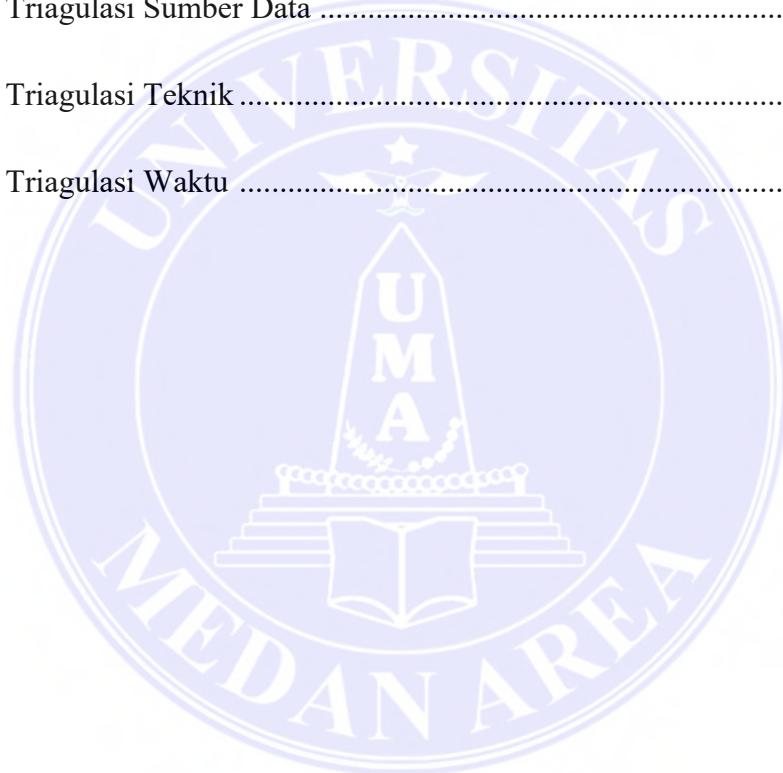
Halaman	
Abstrak.....	V
Abstract.....	Vi
Daftar Tabel.....	Xi
Daftar Gambar	Xii
Daftar Lampiran	Xiii
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
Bab II Tinjauan Pustaka	5
2.1 Kebijakan Publik	5
2.2 Implementasi Kebijakan	8
2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan.....	10
2.2.2 Faktor Penentuan Implementasi Kebijakan.....	13
2.2.3 Tahapan Implementasi Kebijakan.....	15

2.3 Perumahan Swadaya.....	19
2.3.1 Pengertian Perumahan Swadaya.....	19
2.3.2 Fungsi Perumahan.....	20
2.3.4 Tata Cara Perumahan Swadaya.....	21
2.4 Kebijakan Pembangunan Perumahan Untuk Masyarakat Rendah.....	22
2.5 Perumahan Layak Huni.....	23
2.6 Keswadayaan Masyarakat.....	24
2.7 Desa Purwobinangun.....	26
2.8 Penelitian Dahulu.....	28
2.9 Kerangka Pemikiran.....	29
Bab III. Metode Penelitian	35
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	36
3.3 Teknik Pengumpulan Data	36
3.4 Informan Penelitian.....	37
3.7 Triangulasi Data	38
Bab IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	42
4.1 Hasil Penelitian.....	42
4.1.1 Gambaran Umum Kota Langkat.....	43

4.1.2 Keadaan Geografis Kota Langkat.....	44
4.1.7 Visi Dan Misi Kota Langkat.....	46
4.1.8 Data Kemiskinan Penduduk.....	47
4.1.9 Daftar Nama Yang Menerima Bantuan.....	48
4.2 Pembahasan.....	65
4.2.1 1 Implementasi Peraturan Daerah No 8 Tahun 2022 Tentang Perumaha Swadaya Kota Langkat	65
4.2.2 Sumber Daya Manusia Dalam Penetapan Bsp.....	89
4.2.3 Hubungan Antar Organisasi.....	90
4.2.4 Karakteristik Agen Pelaksanakan.....	91
4.2.5 Kondisi Ekonomi Social Dan Politik.....	92
4.2.6 Isposisi Implementator.....	94
4.3 Faktor Penghambat Dan Pendukung.....	95
Bab V. Kesimpulan Dan Saran.....	96
5.1 Kesimpulan.....	96
5.2 Saran.....	98
Daftar Pustaka	100
Lampiran	101

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Penelitian	28
2. Waktu Kegiatan	32
3. Triagulasi Sumber Data	36
4. Triagulasi Teknik	37
5. Triagulasi Waktu	38



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn	13
2. Model Implementasi Kebijakan menurut Grindle	16
3. Kerangka Pemikiran	30



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Lampiran A : Instrumen Pengumpulan Data	47
2. Lampiran B : Dokumentasi	55



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan perumahan menjadi perhatian pemerintah karena rumah yang layak adalah hak dasar masyarakat. Di daerah pedesaan, seperti Desa Purwobinangun, masih banyak ditemukan rumah tidak layak huni. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah melalui Kementerian PUPR meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini bertujuan mendorong masyarakat berpenghasilan rendah membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada implementasinya di lapangan

Permukiman layak huni merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun kenyataannya, masih banyak masyarakat Indonesia, khususnya di daerah pedesaan, yang tinggal di rumah yang tidak memenuhi syarat kelayakan. Salah satunya terjadi di Desa Purwobinangun, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, di mana sebagian penduduknya masih hidup dalam kondisi rumah yang tidak layak secara struktural maupun sanitasi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini bertujuan untuk membantu

masyarakat berpenghasilan rendah agar mampu memperbaiki rumah secara mandiri (swadaya) dengan dukungan bantuan stimulan dari pemerintah. BSPS tidak hanya berfungsi sebagai bantuan finansial, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat melalui prinsip gotong royong dan partisipasi aktif dalam pembangunan.

Meski demikian, dalam praktiknya, implementasi program BSPS di Desa Purwobinangun belum berjalan secara optimal. Permasalahan muncul dalam beberapa aspek penting, seperti:

1. Ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, di mana masih ditemukan penerima yang secara ekonomi tergolong mampu, sementara warga yang benar-benar membutuhkan justru belum tersentuh program.
2. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknis, terutama pada pendamping dan fasilitator lapangan yang memiliki peran penting dalam mendampingi proses pembangunan rumah.
3. Rendahnya partisipasi masyarakat, karena sebagian warga kurang memahami prinsip swadaya dan justru menyerahkan sepenuhnya proses pembangunan kepada tukang.
4. Keterlambatan distribusi material dan pencairan dana, yang menyebabkan proses pembangunan menjadi terhambat.

5. Koordinasi antar lembaga yang belum maksimal, terutama antara pemerintah daerah, dinas perumahan, dan aparat desa, yang berdampak pada efektivitas program.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Implementasi program bantuan stimulan perumahan swadaya di Desa Purwobinangun Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dan aktor pendukung program pengimplementasian program bantuan stimulan perumahan swadaya di Desa Purwobinangun Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini meliputi:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Purwobinangun, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program BSPS di Desa Purwobinangun.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu administrasi publik dan kebijakan publik, terutama mengenai implementasi kebijakan pemerintah dalam program bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya kajian ilmiah mengenai model implementasi kebijakan menurut teori Van Meter dan Van Horn.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah dan Dinas Terkait:

Memberikan masukan dan evaluasi mengenai pelaksanaan program BSPS, sehingga dapat menjadi bahan perbaikan kebijakan di masa mendatang

b. Bagi Pemerintah Desa Purwobinangun:

Sebagai dasar pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan, pendataan, dan peran serta masyarakat dalam program-program bantuan pemerintah.

c. Bagi Masyarakat :

Memberikan pemahaman mengenai pentingnya partisipasi aktif dalam program BSPS agar hasil bantuan benar-benar dirasakan manfaatnya secara maksimal.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya:

Sebagai referensi dan data awal dalam melakukan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan implementasi program perumahan atau kebijakan bantuan sosial lainnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Dye dalam Indiahono (2009:17) mendefinisikan kebijakan publik adalah “apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Interpretasi kebijakan dari kebijakan menurut Dye harus dimaknai dengan dua hal penting: pertama, bahwa kebijakan haruslah dilakukan oleh badan pemerintah, dan kedua, kebijakan tersebut mengandung pilihan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Dalam kebijakan publik memiliki tahapan-tahapan yang harus dilewati. Tahapan dalam kebijakan publik itu sendiri adalah penyusunan agenda, formulasi dan legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi terhadap implementasi, kinerja, dan dampak kebijakan, serta munculah kebijakan baru.

Sehubungan dengan itu Lasswell (Nugroho, 2003:3) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan proyek-proyek tertentu.

Menurut pandangannya, kebijakan merupakan studi tentang proses pembuatan keputusan atau proses memilih dan mengevaluasi informasi yang tersedia, kemudian memecahkan masalah-masalah tertentu. Adapun kebijakan publik sebagaimana yang dirumuskan oleh (Thoha, 2002:62-63) merupakan alokasi nilai yang otoritatif oleh seluruh masyarakat. Akan tetapi, hanya pemerintah sajalah yang berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan

semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari nilai-nilai tersebut.

Menurut Keban (2004:55) bahwa "Public Policy" dapat dilihat sebagai konsep filosofi, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja". Selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kebijakan sebagai suatu konsep filosofis merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan
2. Sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi.
3. Sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya, dan
4. Sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Anderson dalam Budi Winarno (2002:15) merumuskan kebijakan sebagai langkah tindakan secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. Sedangkan menurut Woll (1966) dalam Hessel Nogi Tangkilisan (2003:2) dalam pelaksanaan kebijakan publik terdapat tiga tingkat pengaruh sebagai implikasi dari tindakan pemerintah yaitu:

1. Adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan publik untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat.
2. Adanya output kebijakan, dimana kebijakan yang diterapkan pada level ini menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran, pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat.
3. Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Jadi pada dasarnya, studi kebijakan publik berorientasi pada penyelesaian masalah nyata yang terjadi di tengah masyarakat.

Dengan demikian, analisis kebijakan publik secara umum merupakan ilmu terapan dan berperan sebagai alat atau ilmu yang berusaha untuk memecahkan masalah. Pada konteks ini, kebijakan publik memiliki beragam perspektif, pendekatan maupun paradigma sesuai dengan fokus dan lokus dari obyek penelitian atau obyek kajian. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam mendefinisikan kebijakan ialah bahwa pendefinisian kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan, ketimbang apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu. Definisi kebijakan publik akan lebih tepat bila definisi tersebut mencakup pula arah tindakan atau apa yang dilakukan dengan cepat dan tepat.

2.2. Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk-bentuk program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus dapat diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2002:101) tahap implementasi kebijakan tidak mudah untuk dijalankan, dimana dalam tahap ini sering timbul penyimpangan-penyimpangan dari hal yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan itu Nugroho (2003:158), implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (tidak lebih dan tidak kurang). Selanjutnya Nugroho (2003:158) mengemukakan bahwa perencanaan atau sebuah kebijakan yang baik akan berperan menentukan hasil yang baik. Rangkaian implementasi kebijakan dapat dilihat yaitu dimulai dari program, ke proyek, dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim di dalam manajemen khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program, yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah-masyarakat. Program,

proyek, dan kegiatan merupakan bagian dari implementasi kebijakan. Hasilnya berupa produk yang merupakan materialisasi dari visi.

Menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975) dalam Nugroho (2014:665), mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Implementasi dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan dari kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perlu pula ditambahkan bahwa proses implementasi untuk sebagian besar dipengaruhi oleh macam-macam tujuan yang akan dicapai oleh cara tujuan itu dirumuskan. Dengan demikian, implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan keberhasilan di dalam proses kebijakan, karena melalui tahap ini, keseluruhan prosedur kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat pencapaian yang maksimal yang diharapkan bagi semua implementor yang terlibat di dalamnya. Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat salah satu program pemerintah, yakni Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dijalankan oleh pemerintah khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai upaya meningkat kualitas Rumah Layak Huni di Desa Purwobinangun.

2.2 implementasi kebijakan

2.2.1 pengertian implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan adalah proses untuk mewujudkan kebijakan yang telah

ditetapkan menjadi tindakan nyata, yang dilaksanakan oleh lembaga atau individu pelaksanakan implementasi

Menurut nugroho dan riat(2009:625)implementasi kebijakan public adalah cara agar suatu kebijakan dengan jalan melasankan apa yang sudah ditetapkan dalam kebijakan. Dan menurut agustino dan leo(2008:141)implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan dan subarsono (2005:90)implementasi kebijakan adalah tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan public karena pada tahap inilah suatu kebijakan dilaksanakan untuk mencapai tujuan

2.2.2 faktor penentuan implemetasi kebijakan

Implementasi kebijakan adalah hasil dari proses analisis kebijakan yang memberikan pilihan tindakan atau saran kebijakan factor penetuan rekomendasi kebijakan van meter dan van horn(1975:445-488)yaitu

1. Standar tujuan kebijakan

Rekomendasi harus menunjukan pada tujuan kebijakan yang jelas dan terukur sejauh mana kebijakan dijalankan sesuai rencana tujuan kebijakan adalah sasaran akhir yang dinginkan dicapai dari pelaksanakan suatu kebijakan harus jelas terukur dan harus disepakati bersama oleh membuat kebijakan dan pelaksanakan dan harus realistik dan sesuai kapasitas.

2. Sumber daya

Sumber daya mencakup dana, tenaga kerja. ahli, waktu dan informasi yang memandai sumber daya mencakup ketersediaan tenaga kerja keterampilan dana peralatan dan waktu tanpa sumber daya yang memadai kebijakan yang dirancang.

3. Karakteristik agen pelaksanaan

Struktur organisasi, kompetensi serta kepimpinan dalam lembaga pelaksanakan sangat memengaruhi keberhasilan implementasi.

4. Komunikasi antar organisasi

Harus ada koordinasi yang baik antar lembaga, serta komunikasi vertical dan horizontal.

5. Kondisi social, ekonomi dan politik

Lingkungan eksternal bias memperkuat atau menghambat proses implementasi. kondisi social adalah tingkat pendidikan masyarakat norma dan nilai budaya dan struktur social ertis agama partisipasi masyarakat dalam program

Kondisi ekonomi adalah tingkat kemiskinan dan pengangguran akses terhadap sumber daya (bahan bangunan upah tukang) kemampuan fransial masyarakat dukung program

Kondisi politik yaitu stabilitas politik daerah dan dukungam atau konflik antar pemangku kepentingan komitmen politik dari kepala daerah dan legislative birokasi dan intervansi elite politik.

2.2.3 tahapan implementasi kebijakan

1. Perencanaan Teknis Penjabaran kebijakan menjadi program kerja dan petunjuk teknis
2. Koordinasi Pelaksana Penunjukan pelaksana, pembagian tugas, dan penyediaan sumber daya
3. Sosialisasi dan Persiapan Penyampaian informasi kepada masyarakat dan pelaksana
4. Pelaksanaan Lapangan Implementasi nyata di masyarakat
5. Monitoring & Evaluasi Pengawasan, umpan balik, perbaikan jika ada hambatan

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), tahapan implementasi kebijakan dapat dianalisis melalui enam variabel atau indikator keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Standar dan Tujuan Kebijakan (Policy Standards and Objectives)

→ Apakah tujuan dan sasaran kebijakan jelas, terukur, dan realistik?

2. Sumber Daya (Resources)

→ Tersedianya SDM, dana, informasi, dan sarana prasarana yang memadai.

3. Karakteristik Agen Pelaksana (Characteristics of the Implementing Agencies)

→ Kompetensi, struktur organisasi, dan koordinasi antarlembaga pelaksana.

4. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana (Communication)

→ Keterpaduan komunikasi antara pembuat dan pelaksana kebijakan.

5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik (Socioeconomic and Political Conditions)

→ Dukungan lingkungan masyarakat, kondisi politik, dan ekonomi setempat.

6. Disposisi atau Sikap Pelaksana (Disposition of Implementers)

→ Komitmen dan pemahaman pelaksana terhadap isi kebijakan.

2.3 Perumahan Swadaya

Perumahan swadaya adalah rumah yang dibangun oleh masyarakat dengan prakarsa, kemampuan, dan sumber daya sendiri, baik secara individu maupun berkelompok. Pembangunan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan kondisi ekonomi pemilik rumah. Menurut Permen PUPR No. 13/PRT/M/2016,

"Perumahan swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat sendiri."

Tujuan Perumahan Swadaya

1. Mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
2. Memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan perumahan.
3. Meningkatkan kualitas permukiman yang sehat dan layak.

2.3.1 pengertian swadaya

Swadaya adalah kemampuan, inisiatif, dan usaha yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok masyarakat secara mandiri tanpa bergantung pada bantuan dari pihak luar.

2.3.2 fungsi perumahan

1. Fungsi Sosial

Perumahan menjadi bagian penting dalam membentuk kehidupan sosial masyarakat. Sebagai tempat berinteraksi antar anggota keluarga. Menumbuhkan ikatan sosial di lingkungan permukiman. Menciptakan rasa aman, nyaman, dan privasi bagi penghuninya. Membantu proses pendidikan nilai-nilai budaya dan norma sosial.

2. Fungsi Ekonomi

Perumahan juga memiliki nilai ekonomi yang signifikan, antara lain :Sebagai aset berharga yang bisa diwariskan atau dijual. Mendorong aktivitas

ekonomi di sekitar lingkungan (pasar, UMKM). Memberikan lapangan kerja dalam sektor konstruksi dan perumahan. Sebagai modal produktif, contohnya rumah yang dijadikan tempat usaha.

3. Fungsi Kemanusiaan

Tempat perlindungan dasar manusia dari cuaca, bahaya, dan gangguan luar. Pemenuhan hak dasar manusia untuk hidup layak dan bermartabat. Merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang dijamin dalam UUD.

4. Fungsi Pendidikan dan Kultural

Rumah adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Tempat menanamkan nilai-nilai, budaya, dan tradisi dalam keluarga.

5. Fungsi Lingkungan

Penataan perumahan yang baik mendukung kelestarian lingkungan. Mewujudkan permukiman yang sehat, tertata, dan bebas kumuh.

2.3.3 tata cara perumahan swadaya

Tata cara perumahan swadaya merujuk pada langkah-langkah atau proses yang dilakukan masyarakat secara mandiri dalam membangun, memperbaiki, atau meningkatkan kualitas rumah tinggal mereka. Perumahan swadaya biasanya dilaksanakan dengan prinsip gotong royong, memanfaatkan sumber daya lokal, dan menggunakan pembiayaan sendiri atau bantuan stimulan dari pemerintah, seperti Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Berikut tata cara umum perumahan swadaya:

1. Perencanaan

Identifikasi kebutuhan hunian (misalnya rumah tidak layak huni). Konsultasi atau koordinasi dengan aparat desa atau kelurahan. Membuat rencana pembangunan atau perbaikan rumah (denah, biaya, waktu, tenaga kerja).

2. Pengajuan Bantuan (Jika melalui Program Pemerintah seperti BSPS)

Warga mendaftar melalui pemerintah desa/kelurahan. Pendataan oleh tenaga fasilitator lapangan (TFL). Verifikasi dan validasi kelayakan sebagai penerima bantuan. Penetapan daftar penerima bantuan (penerima BSPS disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat/KPM)

3. Pelaksanaan Pembangunan atau Rehabilitasi

Pelaksanaan secara gotong royong (oleh pemilik rumah dan masyarakat sekitar). Tenaga kerja bisa berasal dari tukang lokal, keluarga, atau bantuan warga. Material diperoleh secara swadaya atau dari bantuan pemerintah. Fasilitator memberikan pendampingan teknis dan administrasi

2.4 Kebijakan Pembangunan Perumahan Untuk MBR

Kebanyakan orang, di banyak negara dan sebagian besar manusia telah mampu menyediakan perumahan bagi dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahwa perumahan.

lebih dapat diterima oleh pengambilan keputusan individual daripada apa yang disebut dengan 'kesejahteraan'. Alasannya jelas: kebutuhan perumahan kita bersifat permanen, karena kita selalu membutuhkan perumahan (King, 2003). Tidak seperti kebutuhan kita untuk kesehatan, ini tidak bergantung pada keadaan. Yang berbeda tentu saja apakah kebutuhan perumahan kita saat ini terpenuhi. Tetapi karena kebutuhan kita bersifat permanen, hal itu dapat diprediksi, memungkinkan pola penyediaan yang lebih teratur dan konsisten. Oleh karena itu, perumahan sebagai komoditas dan aktivitas lebih mudah dipahami karena kita tahu bahwa kita memerlukannya, bahwa kita akan selalu membutuhkannya dan sesuai standar yang kita perlukan (King, 2003). Ini berarti perumahan bagi mereka yang berpenghasilan reguler, dapat dengan aman diserahkan ke pengambilan keputusan

Nicholson dalam Turner (1982:106) mengartikan bahwa proses penyediaan perumahan perlu adanya keleluasaan bagi masyarakat (penghuni) baik menyangkut perangkat lunak (prosedur, peraturan), maupun perangkat keras (unit hunian, sarana dan prasarana). Salah satu perilaku yang dimiliki manusia adalah keberadaan manusia dalam lingkungan yang tidak bisa dikendalikan yang mengakibatkan keterasingan serta mahalnya biaya pembentahan (Turner, 1982:107). Perilaku tersebut juga mempengaruhi proses peruntukan perumahan bagi manusia. Kesalahan dalam mengantisipasi perilaku tersebut dan ketidaksesuaian dalam sistem penyediaan perumahan mengakibatkan tenaga dan dana lebih banyak terbuang dan masa pakai rumah menjadi lebih pendek.

Dalam hal ini, Turner mengelompokkan sistem ini kedalam sektor popular dimana pemerintah harus memberi keleluasaan (otonomi) bagi sektor ini untuk dapat berkembang dan menyediakan perumahan bagi masyarakat menengah kebawah. Sektor ini mengelola sistem perumahan yang secara lokal swakelola atau otonom, dimana peran masyarakat sangat besar dalam merencanakan, membangun dan mengatur jalannya penyediaan perumahan. Penyediaan perumahan, terutama rumah sederhana juga harus memperhatikan segi kemanusiaan (sosial psikologi, kepastian pribadi, kesadaran, kemasyarakatan dan ekonomi para penghuni), menurut Turner, penghuni dapat diajak berpartisipasi dalam perencanaan, pembangunan dan tatalaksana proyek bagian kotanya. Dengan begitu mereka mempengaruhi dan menciptakan dasar-dasar untuk suatu hidup kemasyarakatan yang individual dan tentram. Ide Turner tentang perumahan dan perencanaan dapat dikaitkan melalui konsep tentang apa yang disebut "effective choice" yakni pilihan efektif. Hal ini dapat dilihat sebagai kemampuan untuk menentukan tujuan dan memiliki akses atas sumber daya yang dibutuhkan. Ada tiga prinsip yang digunakan dalam proses perumahan berdasarkan pilihan yang efektif.

Prinsip pertama melibatkan pembatasan peran dan skala kegiatan pemerintah di perumahan. Pemerintah pusat tidak perlu menetapkan tindakan yang berbeda, namun seharusnya hanya menetapkan batasan atau parameter di mana lembaga dan individu dapat beroperasi. Kedua, kontrol proses perumahan harus bersifat lokal dan dengan orang-orang yang menggunakan hasil dari proses

tersebut. Ketiga, kontrol diaktifkan dengan akses ke sumber daya. Ini adalah fungsi pendapatan, tapi juga berkaitan dengan syarat-syarat seperti fasilitasi sumber daya dan sarana untuk mengaksesnya Menurut Ettinger dalam Panudju (2009:29), kriteria perumahan sebaiknya memenuhi standar yang baik ditinjau dari berbagai aspek antara lain sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari segi kesehatan dan keamanan dapat melindungi penghuninya dari cuaca hujan, kelembapan dan kebisingan, mempunyai ventilasi yang cukup, sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah serta dilengkapi dengan prasarana air, listrik, dan sanitasi yang cukup.
- b. Mempunyai cukup ruangan untuk berbagai kegiatan di dalam rumah dengan privasi yang tinggi.
- c. Mempunyai cukup akses pada tetangga, fasilitas kesehatan, pendidikan, rekreasi, agama, perbelanjaan dan lain sebagainya

2.4.1. Subsidi Perumahan

Subsidi perumahan merupakan suatu kredit yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan atau perbaikan rumah yang telah dimiliki. Bentuk subsidi yang diberikan berupa: subsidi selisih bunga, penambahan dana pembangunan, memperbaiki rumah. Perumahan rakyat bisa jadi bentuk kepemilikan rumah dimana properti dimiliki oleh otoritas pemerintah, yang mungkin bersifat pusat atau lokal. Perumahan sosial adalah istilah umum yang mengacu pada perumahan sewa yang mungkin dimiliki dan dikelola oleh negara, oleh organisasi nirlaba,

atau oleh kombinasi keduanya, biasanya dengan tujuan menyediakan perumahan yang terjangkau. Perumahan sosial juga bisa dilihat sebagai obat potensial untuk ketidaksetaraan perumahan. Ada beberapa hal yang dapat dilihat dalam kaitan antara subsidi dengan pembangunan perumahan. Pertama, ada masalah kemampuan. Apa yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri, dan dengan cara apa kita bergantung pada orang lain, apakah itu negara atau agensi lain? Kedua, kita perlu menghargai masalah pengendalian, karena yang penting adalah siapa yang memiliki kekuatan atas sumber daya yang diperlukan untuk menyediakan perumahan berkualitas. Ini adalah pemahaman kedua isu yang menjadi jantung penyediaan perumahan bagi rumah tangga berpendapatan rendah. Ada anggapan bahwa orang miskin tidak mampu, bahwa mereka tidak memiliki aset sendiri dan tidak dapat bernegosiasi melalui kompleksitas lingkungan perkotaan modern.

Namun, seperti yang ditunjukkan oleh de Soto (2000:15) dalam Turner (1976), masalah bagi masyarakat miskin seringkali bukan kekurangan sumber daya namun kemampuan untuk menggunakan dan mengintegrasikan aset mereka ke dalam arus utama perekonomian. Wawasan ini menunjukkan peran yang seharusnya dimainkan pemerintah di perumahan: alih-alih pemerintah yang berusaha menyediakan perumahan itu sendiri, ia harus berperan serba dari fasilitator. Bisa menyediakan sumber daya, menerapkan kerangka kerja umum dan memastikan bahwa kontrak dapat dilaksanakan dan dilindungi.

Di Negara maju rumah-rumah bersubsidi cenderung telah ditinggalkan oleh penduduknya. Hal ini disebabkan karena mereka dapat membeli rumah nonsubsidi

dan memberikan rumah bersubsidi tersebut kepada masyarakat yang tidak memiliki tempat tinggal. Sebagai contoh dari Negara maju yakni keberhasilan Negara Singapura dan Arab Saudi mengenai perumahan yang disebabkan sejumlah faktor. Pertumbuhan ekonomi Singapura berdampak pada berkurangnya ketergantungan penduduk pada pemerintah dan menurunnya pertambahan penduduk. Hal ini memungkinkan pemerintah meningkatkan dana bagi penyediaan rumah bagi penduduk miskin. Selain itu tidak seperti Negara lainnya, lahan di Singapura dimiliki pemerintah, sehingga pemerintah tidak perlu menyediakan dana pembelian lahan. Sementara di Arab Saudi pendapatan Negara yang sangat besar memungkinkan pemerintah menyediakan rumah bagi setiap penduduk

2.4.2 Perumahan Swadaya

Konsep perumahan swadaya dari sudut pandang perumahan penduduk berpendapatan rendah, diartikan sebagai kegiatan kelompok penduduk berpendapatan rendah dalam memenuhi kebutuhan rumah melalui sumber daya sendiri baik berupa tenaga kerja dan keuangan (Zhang, Zhao dan Tian, 2003). Sementara Dewar (1981) dalam Ntema (2011) menekankan hal yang sedikit berbeda, dengan menyatakan bahwa perumahan swadaya adalah sebuah proses pembangunan rumah yang individu dan komunitas memegang kendali terhadap keputusan tentang rumah dan lingkungannya, tanpa perlu membangunnya sendiri. Untuk definisi ini, perumahan swadaya didefinisikan sebagai proses pembangunan perumahan yang memungkinkan penduduk miskin bertindak

sebagai pengambil keputusan pada tahapan perencanaan, desain, pengelolaan dan implementasi sementara pemerintah hanya menyediakan dana awal, pelatihan dan pengawasan selama pelaksanaan proyek. Rumah swadaya dapat dikembangkan melalui rumah swadaya gotong royong (mutual self-help) dan pemerintah bersama LSM dapat mendukung dengan memberi insentif berupa bantuan teknis. Sebagai hasilnya, perumahan swadaya dapat menjadi cara meningkatkan taraf hidup.

2.5 Standar Rumah Layak Huni

Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kesehatan penghuninya serta kecukupan minimum luas bangunan. Berdasarkan Habitat for Humanity Indonesia, terdapat 3 poin penting yang harus kita ketahui dan terapkan sebagai syarat sebuah rumah bisa dikatakan sebagai rumah layak huni.

1. Memenuhi Persyaratan Keselamatan Bangunan

Poin pertama yang harus kita ketahui sebagai salah satu syarat rumah layak huni adalah keselamatan bangunan. Hal ini bisa kita capai dengan menerapkan standar mengenai struktur bangunan yang terdiri dari struktur bawah bangunan atau pondasi, struktur tengah bangunan atau ring balk, serta struktur atas bangunan atau atap. Keselamatan bangunan dapat tercapai jika kita menerapkan standar kualitas dan kompetensi bangunan yang tertuang dalam sertifikasi dan

standarisasi. Dengan penerapan standar tersebut, peluang terjadinya kegagalan bangunan bisa terminimalisir.

2. Menjamin Kesehatan Bagi Para Penghuninya

Selain harus memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, poin penting kedua yang harus kita penuhi untuk mewujudkan rumah layak huni yaitu bangunan harus menjamin kesehatan para penghuninya dapat kita capai dengan standar pencahayaan, penghawaan, dan fasilitas sanitasi bangunan

3. Memenuhi Kecukupan Luas Minimum

Poin penting terakhir yang harus kita terapkan untuk membangun sebuah rumah layak huni yaitu kecukupan luas minimum bangunan. Sebuah rumah yang memiliki fungsi utama sebagai hunian, selain harus memenuhi syarat keamanan gedung dan dapat menjamin kesehatan para penghuninya, juga harus memenuhi kecukupan luas minimum ruangan. Rumah terdiri dari ruang tidur atau ruang serbaguna serta dilengkapi dengan fasilitas sanitasi. BSPS memiliki tiga kriteria bantuan obyek yakni peningkatan kualitas (PK), pembangunan baru (PB), dan pembangunan PSU. Untuk PK, RTLH menjadi sasaran program BSPS dan yang bisa mendapatkan bantuan ini adalah RTLH dengan kondisi tak memenuhi persyaratan seperti keselamatan bangunan, kecukupan minimal luas bangunan, dan kesehatan penghuni. Untuk PK, RTLH menjadi sasaran program BSPS dan yang bisa mendapatkan bantuan ini adalah RTLH dengan kondisi tak memenuhi persyaratan seperti keselamatan bangunan, kecukupan minimal luas bangunan,

dan atau kesehatan penghuni. Setidaknya ada sembilan kriteria ketidaklayakan sebuah rumah. Adapun kriteria-kriteria tersebut adalah luas lantai per kapitanya kurang dari 7,2 meter persegi, dan jenis atap rumah terbuat dari daun atau lainnya. Kemudian jenis dinding rumah terbuat dari bambu, lantainya tanah, tak memiliki akses ke sanitasi layak, sumber penerangan bukan listrik, dan tak ada akses ke air minum layak.

2.6 Keswadayaan Masyarakat

Teori selanjutnya adalah keswadayaan masyarakat. Keswadayaan masyarakat adalah kemandirian masyarakat dalam memutuskan apa yang menjadi masalah dan kebutuhannya dan apa yang akan dilakukan untuk masa depannya . (Soetomo, 2012:32). Terdapat beberapa unsur keswadayaan masyarakat. Pertama, kebutuhan bersama, dapat dilihat dari adanya visi yang ideal dan abstrak diturunkan ke dalam formulasi yang lebih operasional. Dalam proses tersebut dibutuhkan kesadaran masyarakat dan partisipasi lokal. Kesadaran meliputi kesadaran akan kondisi yang diharapkan, kesadaran akan kondisi kehidupan saat ini, serta kesadaran akan adanya kesenjangan di antara keduanya. Sedangkan partisipasi lokal dibutuhkan dalam mengumpulkan dan konsolidasi dukungan masyarakat serta mempermudah implementasi, memelihara kesinambungan kegiatan,pengembangan atau perluasan kegiatan. Hal tersebut mendorong masyarakat untuk lebih inisiatif, mengurangi apatis dan rasa putus asa dalam menghadapi permasalahan.

Kedua, adanya potensi dan sumber daya lokal. Hal tersebut dapat dilihat dari tiga upaya yang mengubah sumber daya yang laten menjadi manifes. Pertama, identifikasi kebutuhan masyarakat secara terus menerus sejalan dengan perkembangan yang terjadi di dalam lingkungan tersebut. Kedua, identifikasi potensi, sumber daya dan peluang yang juga selalu berkembang. Identifikasi ini harus mampu meliputi keseluruhan potensi dan sumber daya yang ada, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya sosial. Ketiga, proses dan upaya untuk mencari cara yang lebih menguntungkan dalam memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada. Masyarakat memiliki sumber daya yang terbatas sehingga perlu pemanfaatan yang efisien dan maksimal sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang pada akhirnya mengapresiasi kemampuan mereka sendiri. Masyarakat harus mampu memilih mana sumber daya yang mampu mendukung pencapaian jangka pendek dan mana yang mampu

Ketiga, pengetahuan dan kearifan masyarakat yang terbentuk dari proses interaksi antarwarga masyarakat dan interaksi terhadap lingkungannya. Dalam proses tersebut terjadi tindakan yang bersifat adaptif dan inovatif. Terdapat pula proses bekerja sambil belajar dimana kemampuan dan kreativitas masyarakat terakumulasi dari proses saling bertukarnya pengetahuan, keahlian, dan aset material yang dipergunakan untuk mencapai tujuan bersama. Pengetahuan dan kearifan lokal selalu berkembang baik secara kumulatif maupun verifikatif. Kumulatif artinya pengetahuan masyarakat dapat berkembang semakinluas dan

semakin banyak sejalan dengan pengalaman yang semakin bertambah. Verifikatif artinya melalui pengalaman dalam implementasi pengetahuan dan pengalaman lokal yang dimiliki, masyarakat dapat belajar tentang kekurangan dan kelebihan yang kemudian dijadikan sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan.

Keempat, keberadaan institusi sosial yang dapat dilihat dari proses bekerja sambil belajar dalam kehidupan keseharian yang sudah menjadi rutinitas yang kemudian menghasilkan aktivitas bersama yang terpola. Kehadiran institusi sosial merupakan manifestasi kemampuan masyarakat untuk mengorganisasikan kegiatan bersama. Institusi sosial merupakan media partisipasi masyarakat, perumusan perencanaan lokal, memberikan pelayanan, mobilisasi sumber daya lokal, sarana identifikasi kebutuhan lokal, dan sarana peningkatan kesadaran dan komitmen untuk tindakan bersama dalam rangka mewujudkan visi bersama.

2.7 Desa purwobinangun

Menurut undang undang no 6 tahun 2014 tentang desa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dana tau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintah negara kesatuan republic Indonesia

2.8 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang integral seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan implementasi lebih awal terhadap pustaka tau karya-karya yang lebih terdahulu mempunyai relevansi terhadap topik yang diteliti.

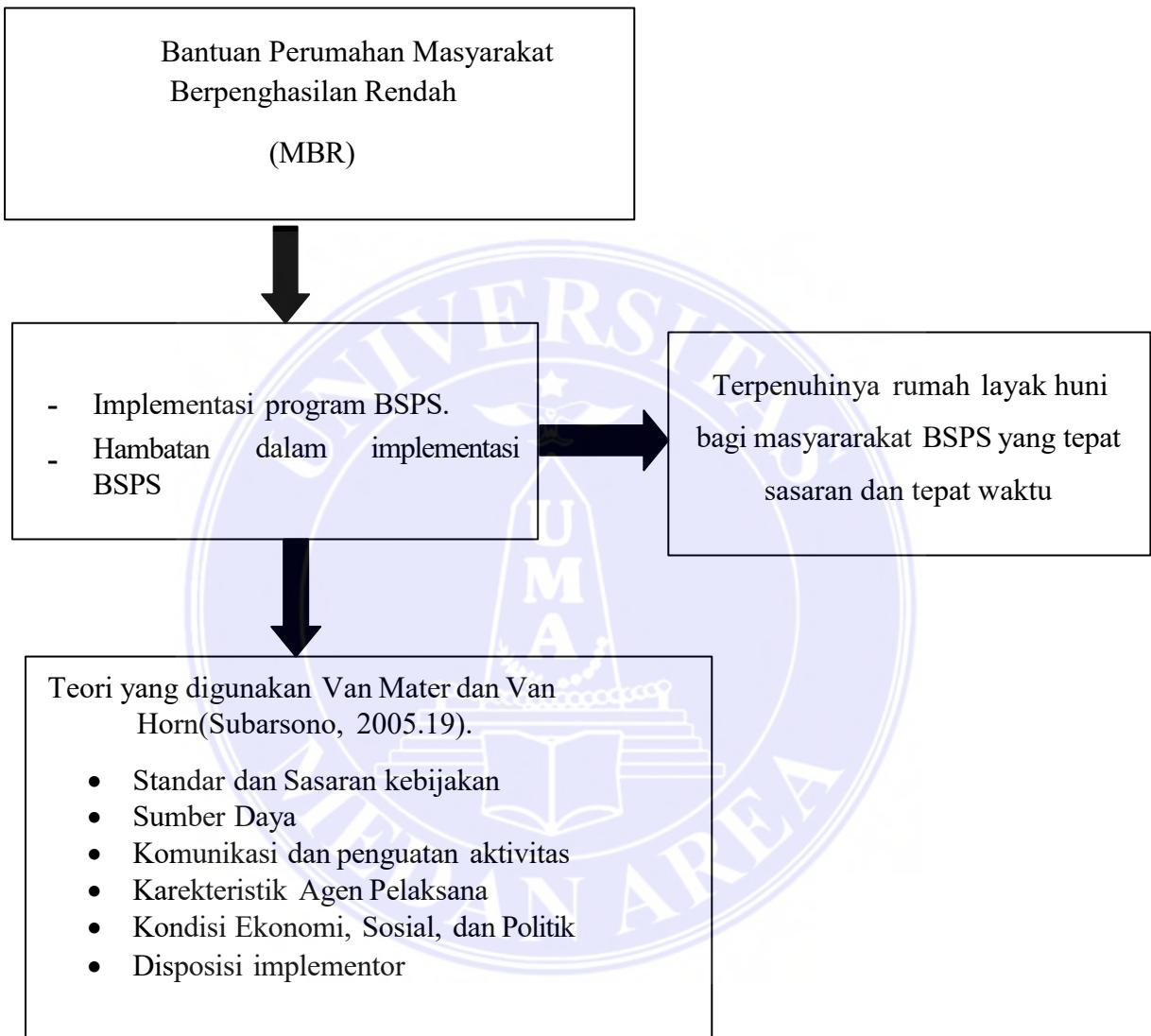
Table 1. Penelitian

No	Penulis	Judul Skripsi	Metode	Teori	Kesimpulan
1	Ordinus Fernando	Implementasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni Di Kabupaten Supiori Provinsi Papua	deksritif kualitatif	Van Meter Van Horn	Implemetansi progaam rumah layak huni di Kabupaten Supiori Provinsi Papua belum cukup baik permasalah yang terjadi diantar sumber daya.
2	Vivi Octahari	Implemetasi Program Rehabilitas Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Berpenghasilan.	deksritif kualitatif	Van Meter Van Horn	Implementasi program belum terlaksanakan dengan efektif karena terkendala masalah biaya yang belum memandai.
3	Fauzia	Implementasikan	deksritif	Van	Implemantasi program

	Amalia	Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) (Studi Kasus Desa Purwobinangun Kec. Sei Bingai Kab.Langkat)	kualitatif	Meter Van Horn	tersebut kemampuan yamg pelaksanaan rumah bersubsidi membuat infomasi pelaksanaan rumah subsidi berjalan.	kurangnya sumber daya memahami program
--	--------	---	------------	----------------	---	--

2.9. Kerangka Pemikiran

Sugiono, (2007:65) mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah di identifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka Pemikiran bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang variabel penelitian dan indikator-indikator yang menentukannya. Adapun kerangka pikiran dalam penelitian ini sebagai berikut.



Gambar 3. Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif.

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Dengan demikian bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan memperoleh informasi terkait dengan metode observasi dan wawancara untuk mendapatkan data tentang proses implementasi pelaksanaan program bantuan perumahan swadaya di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan mencari informasi terkait proses pengimplementasian kebijakan PBPS, yang mana apakah para implementor telah mengtahui bagaimana standard dan sasaran kebijakan yang seharusnya, agar dapat mencapai hasil kebijakan itu sendiri. Selain itu penulis juga akan mengobservasi terkait komunikasi dan sikap antar implementor yang mana untuk mencapai sasaran kebijakan, sikap dan koordinasi atau kerjasama

antar implementor sangat dibutuhkan agar implementor dapat mengoptimalkan sumber daya, potensi untuk mencapai kesejahteraan desa dan memiliki rumah layak huni.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Purwobinangun, yang terletak di Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Desa Purwobinangun merupakan salah satu desa yang menerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Desa Purwobinangun dipilih karena: Merupakan desa dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pelaksanaan program BSPS. Telah beberapa kali mendapatkan alokasi bantuan BSPS. Menjadi salah satu desa yang menunjukkan dinamika implementasi kebijakan secara langsung melalui keterlibatan berbagai aktor seperti pemerintah desa, fasilitator lapangan, dan masyarakat penerima manfaat.

Secara geografis, Desa Purwobinangun terletak kurang lebih ±20 kilometer dari pusat pemerintahan Kabupaten Langkat (Stabat), dengan akses jalan darat yang cukup memadai untuk menunjang kegiatan penelitian lapangan.

3.2.2 Waktu Penelitian

Tabel 2. Waktu Kegiatan

No	Uraian kegiatan	Okt 2024	Nov 2024	Des 2024	Jan 2025	Feb 2025	Mar 2025	Apr 2025	Mei 2025	Juni 2025	Jul 2025	Agst 2025
1	Pengajuan judul											
2	Penyusunan proposal											
3.	Seminar proposal											
4	Pengambilan data penelitian											
5	Seminar hasil											
6	Revisi skripsi											
7	Sidang meja hijau											

Sumber: data oleh penelitian,2024

3.3informan penelitian

Informasi dan data merupakan faktor yang sangat penting untuk menjalankan sebuah penelitian. Dalam penelitian kualitatif informan penelitian merupakan sumber utama untuk mendapatkan data deskripif yang akan diolah nantinya untuk menarik kesimpulan. Untuk dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai masalah penelitian yang dibahas maka penulis menggunakan teknik informan. Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Dalam penelitian ini ada dua jenis informan penelitian yaitu:

1. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Purwobinangun Ibu Rismawati.
2. Informan utama dalam peneltian ini merupakan masyarakat yang merasakan dampak langsung seperti Bapak Prewin Sukbakti, Ibu Marmiayan Ginting , dan Ibu Pariyana.
3. Informan Pendukung dalam penelitian ini adalah tokoh tmasyarakat selaku penghuni Desa Purwobinangun seperti Bapak Josep selaku Sekretaris desa, Nursa S.E, Eka Rahmani,Jelita S.Pd dan Pelita S.H.

Table 5 informan penelitian

Nama informan	Uraian	Keterangan	Jumlah orang
Eddy sinanggulang	Kepala sub bagian perumahan swadaya dinas perumahan dan pemungkiman dan kawasan	Informan kunci	1 orang
Josep	Selaku pegawai perumahan swadaya di desa purwobinangun kecamatan sei bingai	Informan utama	1 orang
Prewin subkati (mendapat perumahan swadaya) Marmiayan gingting (mendapat perumahan swadaya) Pariyana (mendapat perumahan swadaya)	Masyarakat terdaftar sebagai pedapatan swadaya di desa purwobinangun	Informan tambahan	3 orang

Sumber: diolah penelitian 2024

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan menggali data dari berbagai sumber, yaitu wawancara, observasi dan kemudian menuliskannya dalam catatan lapangandengan memanfaatkan dokumen pribadi, dokumen resmi, foto, gambar,

dan sebagainya (Miles dan Huberman, 1992: 15-21). Dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan tiga teknik yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengumpulan data adalah mencari untuk mencatat dan mengumpulkan segala sesuatunya secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dilapangan yaitu pencatatan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada dilapangan (Sugiyono, 2010: 338) sama seperti Teknik pengumpulan data yang telah dituliskan diatas, maka yang akan dilakukan dalam pengumpulan data ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mengetahui permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut.

1.observasi

Menurut lexy.J meleong (2006:175) bahwa observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala gejala tampak pada objek penelitian dan sugiyono(2019: 203) bahwa observasi adalah teknik mengumpulkan data yang mengalami perilaku manusia proses kerja dan gejala alam.

Metode observasi pada penelitian ini mengamati fenomena yang menjadi objek penelitian implementasi program bantuan stimulan perumahan swadaya didesa purwobinangun kecamatan sei bingai kab langkat segala informasi yang mengaruhi objek tersebut untuk mempelajari data data yang diperlukan sebagai paduan analisis topik penelitian .

2.wawancara

Sugiyono (2016:231) Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber.” Burhan Bungin (2008:122) Wawancara adalah metode pengumpulan data utama dalam penelitian kualitatif untuk menggali pengalaman, persepsi, dan makna yang dibentuk oleh subjek penelitian tentang suatu tententukan penelitian telah mempersiapkan pedoman wawancara dan melakukan wawancara dengan lima informan yakni pegawai sub bagian bidang bagian perumahan swadaya di Kota Langkat dan Kantor kepala desa purwobinangun kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat dan Tiga orang masyarakat yang terdaftar sebagai penerima bantuan Stimulan perumahan Swadaya di Desa Purwobinangun

3.dokumentasi:

Burhan Bungin (2020:129) –Dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan teknik untuk menelusuri data historis, administratif, visual, atau naratif sebagai bukti pelengkap terhadap fenomena sosial yang dikaji.”

Sugiyono (2019:240) –Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data langsung dari dokumen, seperti catatan harian, laporan kegiatan, foto, dan dokumen resmi lain yang berkaitan dengan penelitian.”

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang tertutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian. Atau analisis data juga bisa diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil dari sebuah penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan.

3.6 Triangulasi Data

Sugiyono (2017:87) triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Jika hasil dari triangulasi menunjukkan data yang sama maka data tersebut dapat di percaya seperti :

A.Triangulasi sumber : menurut para ahli van meter dan van horn(1975:445-488) triangulasi sumber merupakan teknik dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk meningkatkan validasi data dengan menggunakan berbagai sumber data untuk membandingkan informasi –informasi

Tabel 3. Triangulasi Sumber Data

Sumber	Isi Wawancara	Kesesuaian Dengan Observasi	Kesesuaian Dengan Dokumen
Kepala	Program BSPS sangat membantu	Renovasi rumah	Terdapat SK

Desa	masyarakat miskin dan perlu dilanjutkan	terlihat signifikan adapeningkatkan kualitas bangunan	penerima dan laporan kegiatan dikantor desa
Fasilitator BSPS	Pelaksanaan terkendala cuaca dan logistic keterbatasan jumpa fasilitator	Pendampingan tidak merata ke semu warga karena beban notulen wilayah	ada laporan pendampingan dan pelatihan penerima manfaat
Penerima bantuan	Merasa bantu,namun banyak terbinggung dalam proses teknis dan laporan	Rumah udah direnovasi namun kualitas berbeda antarkwintasi penerima	Sebagai menyimpan material sebagai tidak terdokumentasi
Tokoh masyarakat	Program baik, tetapi kurang sosialisasi awal pembinaan pasca renovasi	Banyak warga bertanya ke toko local tentang bangunan	Ada bukti musyawarah desa teknis awal terkait sosialisasi program

B. Triagulasi teknik adalah cara untuk mendapatkan yang valid dengan

menggunakan teknik yang berbeda untuk sumber data yang sama

Tabel 4. Triagualasi Teknik

Aspek yang dikaji	Wawancara	Observasi	Dokumentasi

Kualitas renovasi rumah	Penerima menyatakan rumah lebih layak dan aman	Rumah terlihat telah direnovasi namun berbeda kualitas	Foto rumah sebelumnya dan sesudah renovasi tersedia diarsip desa
Pelaksana program sesuai prosedur	Fasilitator mengakui adanya kendala teknis dan keterlambatan distribusi	Beberapa rumah selesai melebihi jadwal	Laporan kegiatan menunjukan pelaksanaan mundur dari jadwal awal
Pemahaman masyarakat terhadap program	Penerima menyebut kebingungan dalam proses teknis dan pembelian material	Warga terlihat sering meminta bantuan tokoh local /fasilitator	Tidak semua warga mencatat atau menyimpan buktik penggunaan dana bantuan
Partisipasi masyarakat dalam kegiatan	Kepala desa dan tokoh masyarakat menyebut antusiasme cukup tinggi	Warga terlibat dalam gotong royong renovasi rumah	Notulen musyawarah dan daftar hadir kegiatan tersedia
Peran fasilitator	Fasilitator mengaku kesulitan mendampingin rumah yangtampak	Hanya beberapa rumah yangtampak	Jadwal kunjungan

	semua warga	diawasi langsung oleh fasilitator	fasilitator tidak sepenuhnya sesuai dengan catatan lapangan.
--	-------------	-----------------------------------	--



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Implementasi program BSPS telah berjalan cukup baik ditinjau dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi. Hal ini terlihat dari adanya koordinasi antara pemerintah desa, tenaga fasilitator lapangan (TFL), dan penerima bantuan, serta adanya pelaporan pelaksanaan kegiatan secara berkala. Partisipasi masyarakat sebagai penerima bantuan cukup tinggi. Mereka terlibat aktif dalam pembangunan rumah mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan, sesuai prinsip swadaya. Kendala utama yang dihadapi dalam implementasi program adalah keterlambatan penyaluran dana, keterbatasan tenaga pendamping di lapangan, dan kurangnya pemahaman teknis dari sebagian penerima bantuan dalam proses pembangunan rumah yang sesuai standar. Faktor pendukung program meliputi komitmen pemerintah daerah, kerjasama lintas sektor, serta keberadaan tenaga fasilitator lapangan (TFL) yang berperan penting dalam membantu masyarakat memahami teknis pelaksanaan program. Program BSPS memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah serta mendorong kemandirian masyarakat dalam membangun hunian yang layak.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap implementasi Program BSPS di Desa Purwobinangun, dapat disimpulkan bahwa:

Aktor Pendukung program berasal dari berbagai elemen yang memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan program. Aktor-aktor tersebut antara lain:

Masyarakat penerima manfaat, yang menunjukkan partisipasi aktif melalui gotong royong dan kesediaan untuk memenuhi swadaya dalam bentuk tenaga, material tambahan, atau dana tambahan. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), yang berperan sebagai pendamping teknis dan administrasi, membantu memastikan proses pembangunan berjalan sesuai petunjuk teknis dan waktu pelaksanaan.

Pemerintah Desa Purwobinangun, yang berperan dalam pendataan, seleksi calon penerima, serta menjembatani komunikasi antara masyarakat dan instansi pelaksana. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat, yang menyediakan bantuan dana dan memfasilitasi pelaksanaan program melalui regulasi dan pengawasan.

2. Faktor Penghambat dalam pelaksanaan program meliputi:

Keterlambatan pencairan dana dari pemerintah pusat yang menyebabkan keterlambatan proses pembangunan fisik rumah. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai teknis pelaksanaan program akibat terbatasnya sosialisasi dan edukasi pada tahap awal. Kendala administrasi, seperti sulitnya memenuhi persyaratan dokumen legalitas lahan dan identitas, yang menghambat proses verifikasi dan realisasi bantuan. Keterbatasan sumber daya manusia teknis di tingkat lokal, sehingga kualitas pembangunan harus terus diawasi oleh TFL agar

sesuai standar Faktor eksternal seperti cuaca dan kondisi geografis, yang juga menjadi tantangan teknis dalam proses pembangunan rumah.

5.2 Saran

1. Implementasi Program BSPS di Desa Purwobinangun

Implementasi Program BSPS di Desa Purwobinangun dilakukan melalui beberapa tahapan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dari Kementerian PUPR. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Adapun pelaksanaan di lapangan mencakup:

Perencanaan dan Pendataan Calon Penerima

Pendataan dilakukan oleh tim pelaksana desa dan TFL (Tenaga Fasilitator Lapangan). Calon penerima bantuan diverifikasi berdasarkan kriteria seperti pendapatan rendah, rumah tidak layak huni, dan belum pernah menerima bantuan serupa.

Pelibatan Masyarakat Secara Swadaya

Program ini bersifat stimulan, sehingga masyarakat penerima bantuan wajib memberikan kontribusi berupa tenaga, material tambahan, atau dana pendamping. Gotong royong masih menjadi nilai penting dalam pelaksanaan pembangunan rumah.

3. penyaluran Dana dan Pengawasan

Dana BSPS disalurkan melalui rekening bank atas nama kelompok masyarakat (Pokmas) dan digunakan untuk pembelian bahan bangunan Pengawasan dilakukan oleh fasilitator teknis dan TFL agar pembangunan sesuai dengan standar teknis

Koordinasi Lintas Lembaga

Pelaksanaan program melibatkan koordinasi antara Kementerian PUPR, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat setempat. Koordinasi ini penting untuk kelancaran administrasi dan distribusi logistik bangunan.

2. Faktor Penghambat Implementasi BSPS

Keterbatasan Dana Pendamping dari Penerima Bantuan

Karena program ini bersifat stimulan, penerima wajib memberikan kontribusi. Namun, kondisi ekonomi sebagian penerima sangat terbatas, sehingga sulit menyediakan dana atau material tambahan.

Kurangnya Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang Kompeten

Kekurangan tenaga teknis di lapangan menyebabkan kurang maksimalnya pengawasan dan pendampingan terhadap penerima bantuan.

Minimnya Sosialisasi dan Pemahaman Masyarakat

Beberapa masyarakat belum memahami prosedur pelaksanaan BSPS, termasuk tanggung jawab dan hak mereka, sehingga terjadi miskomunikasi.

Aktor Pendukung Implementasi BSPS

Pemerintah Desa

Mendukung penuh dengan memfasilitasi pendataan, pendampingan, dan pengawasan di tingkat desa.

Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)

Berperan penting dalam memberikan bimbingan teknis, pengawasan, dan pelaporan perkembangan pembangunan rumah.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim)

Memberikan dukungan teknis dan administratif dalam pengawasan dan koordinasi lintas instansi.

Kelompok Masyarakat (Pokmas)

Menjadi pengelola teknis pelaksanaan bantuan di tingkat lokal, termasuk pembelanjaan bahan bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin,Said Zainal, (2004). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, (2006). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Suara Bebas , (2012). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humarika

AG. Subarsono. (2012). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Agustinus, Leo. (2006). Politik dan Kebijakan Publik. Bandung: AIP

Anderson, James E. Public Policy Making, Newyork: Holt, Renehart and Wisto. 1979

Anggara, Sahya, (2014). *Kebijakan Publik*: Pustaka Setia, Bandung

Arikunto, Suharsimi,(2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT

Danim,Sudarwan. 2003. Ekonomi sumber Daya Manusia, Jakarta : Pustaka setia

D.S. Van Meter dan Varn Horn ,(1995).the policy implementation proces: A conceptual framework: Ohio:State university

Easton, David (1953). The political system :An inquiry into the state of political science, New york:Knopf

Esterberg, Kristin G. (2002). Qualitative Methods In Social Research. New York : Mc Graw Hill

Eyestone, Robert. (1971) The Thread of Policy; A Study in Policy Leadership.

Indianapolis

Lasswell, H. D., & Kaplan, A. (1950). Power and Society: A Framework for Political Inquiry.

Lexy j. Moleong. 2005 Meodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya:Bandung

Maslow, A. H. (1943). A Theory of Human Motivation. Psychological Review

Miles, and Huberman. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, _____ (1984). Qualitative data analysis. London: Sage.

Nasution, S, Metode Penelitian Naturalistik – Kualitatif, (Bandung: Tarsito, 1998)

Riyanto, (2012), Penelitian Kualitatif. Surabaya: Penerbit SIC

Ripley, Rendal B. And Grace A.Franklin , Policy Implementation and Bureacracy,second edition,thodorey press, Chiacago-Illionis,2014

Smith, Mark K. 2009. Teori Pembelajaran dan Pengajaran. Yogyakarta: Mirza Media Pustaka.

Sugiyono, , (2019), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D.Bandung: Alfabeta

Udoji, Chief J.O.,(1981),The african public sevant As A public policy In Africa.Addis Abeba: African Association For public administrartion and Management.

Sumber Lainya

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 47 Tahun 2015 tentang penggunaan dana alokasi khusus bidang infrastruktur

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Peraturan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Herlina, Dewi. Analisis Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya(BSPS) dalam Menyediakan Rumah Layak Huni di Kelurahan Berabol, KecamatanBajenis, Kota Tebing Tinggi.Skripsi.Fakultas Ilmu Sosial.





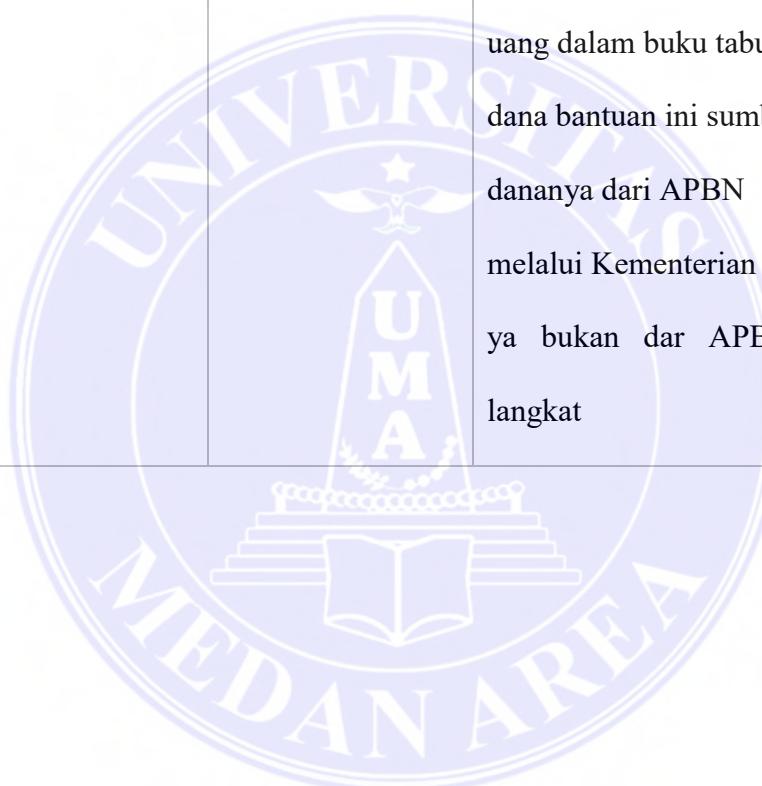
PERTANYAAN KEPADA INFORMAN UTAMA

Pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

No	Nama Informan	Pertanyaan	Jawaban
1	Eddy Sinaguliang	Bagaimana Komunikasi antara pihak Desa dengan pihak PKP ?	Kalau komunikasi kami dengan pihak desa kami rasa cukup baik , kami selalu berkoordinasi dengan desa terkait program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, baik progres maupun kendala yang terjadi di lapangan.
		Apakah sudah ditentukan waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan ini?	Dalam Pelaksanaan program BSPS ini ditentukan jangka waktu +-2 Bulan.
		Apa Tugas dan tanggung jawab saudari dalam pelaksanaan program	beberapa yang kami temui foto yang kami terima berbeda dengan foto setelah survei. Tugas dan fungsi kami

	ini?	<p>sebagai tim Verifikasi , kami sudah kerjakan sebaik dan semaksimal mungkin kami tetap terpacu dalam peraturan kementerian</p> <p>PUPR , kami melakukan survei kelokasi dan meminta Data ke Kepala Desa agar pekerjaan cepat terselesaikan dan terealisasi dengan baik.(Tim verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh BP2P, yang terdiri atas unsur BP2P.</p>
	Dalam Pelaksanaan Program ini tentu dibutuhkan Sumber daya, Sumber daya apa saja yang diperlukan dalam Pelaksanaan Program	<p>Untuk sumber daya , Kalau dari kami SDM nya pastinya masyarakat penerima bantuan, Kepala Desa, pihak dinas PKP, kalau untuk dananya program BSPS penerima bantuan diberikan dana sebesar 20</p>

		<p>ini?</p> <p>juta, dimana dan tersebut dialokasikan 17,5 juta untuk bahan material dan 2,5 juta untuk upah tukang. Dananya disalurkan dalam bentuk uang dalam buku tabungan, dana bantuan ini sumber dananya dari APBN melalui Kementerian PUPR ya bukan dar APBD kabupaten langkat</p>
--	--	---



PERTANYAAN KEPADA INFORMAN KUNCI

Kepala Desa Purwobinangun dan Pengurus Desa Purwobinangun

No	Nama Informan	Pertanyaan	Jawaban
1	Bu Rismawati selaku Kepala Desa Purwobinagun, Bapak Joseph selaku Sekretaris Kepala Desa Purwobingun dan Bu Elita selaku Keuangan Kepala Desa Purwobinangun.	Ada berapa KK dari desa ini yang sudah mendapatkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini?	Samapai saat ini ini sudah ada 20 KK yang sudah menerima bantuan ini.
		Berapa Jumlah dana yang diterima masyarakat penerima bantuan ini ? bantuan ini?	Untuk jumlah dana itu sudah terpatok dari pusat, Masyarakat menerima dana sebanyak 20 juta yang dialokasikan untuk bahan bangunan sebesar 17,5 juta dan 2,5 jt lagi sebagai upah tukang.

PERTANYAAN KEPADA INFORMAN TAMBAHAN

Masyarakat Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan Masyarakat

No	Nama Informan	Pertanyaan	Jawaban
1	Pak Prewin Sukbakti selaku masyarakat	Bagaiman perasaan saudara setelah terdaftar menjadi calon penerima bantuan ini?	Perasaan kami Tentunya senang,karena kami diberi kesempatan dan diberi biaya untuk merenovasi rumah kami menjadi lebih baik.
		Berapa banyak dana yang saudara terima?	Dana yang kami terima itu sebesar 20 juta dengan alokasi.
2	Ibu Mamiayan Ginting selaku masyarakat	Apakah saudara sudah sanggup berswadaya untuk menambahi dana yang diberikan?	Untuk menambahi dana yang diberikan itu sudah menjadi kewajiban saya setelah saya terdaftar menjadi calon penerima bantuan

			ini, kalau dari penghasilan saya mungkin tidak cukup di karenakan masih banyak biaya atau kebutuhan sehari-hari yang harus saya tanggung, jadi untuk menambahi dana.
3	Bu Mariyatik Sitepu selaku masyarakat	Apakah Saudari sudah di data pihak desa atau sudah mendaftar menjadi calon penerima bantuan ini?	Kalau dari pihak desa kami sudah di data,Mereka juga sudah meminta berkas-berkas seperti KK, KTP tetap sampai sekarang

DATA INFORMAN PENELITIAN

1. Informan Kunci

Nama : Eddy Sinaguliang
Jenis kelamin : Laki-laki
Usia : 42 tahun
Jabatan : Pengawas Tata Bangunan dan Kawasan Permukiman

2. Informan Utama

a) Nama : Rismawati
Jenis kelamin : Perempuan
Umur : 36 tahun
Jabatan : Kepala Desa Purwobinangun

b) Nama : Josep
Jenis kelamin : Laki-laki
Umur : 47 tahun
Jabatan : Sekretaris Desa

c) Nama : Jellita Anggarani
Jenis kelamin : Perempuan
Umur : 25 tahun

Jabatan : Keuangan Kepala Desa Purwobinangun

2. Informan Tambahan

a) Nama : Prewin Sukbakti

Jenis kelamin : Laki-laki

Umur : 52 tahun

Pekerjaan : Petani

b) Nama : Marmiayan Ginting

Jenis kelamin : Perempuan

Umur : 64 tahun

Pekerjaan : Petani

c) Nama : Pariyana

Jenis kelamin : Perempuan

Umur : 56 tahun

Pekerjaan : Pertani

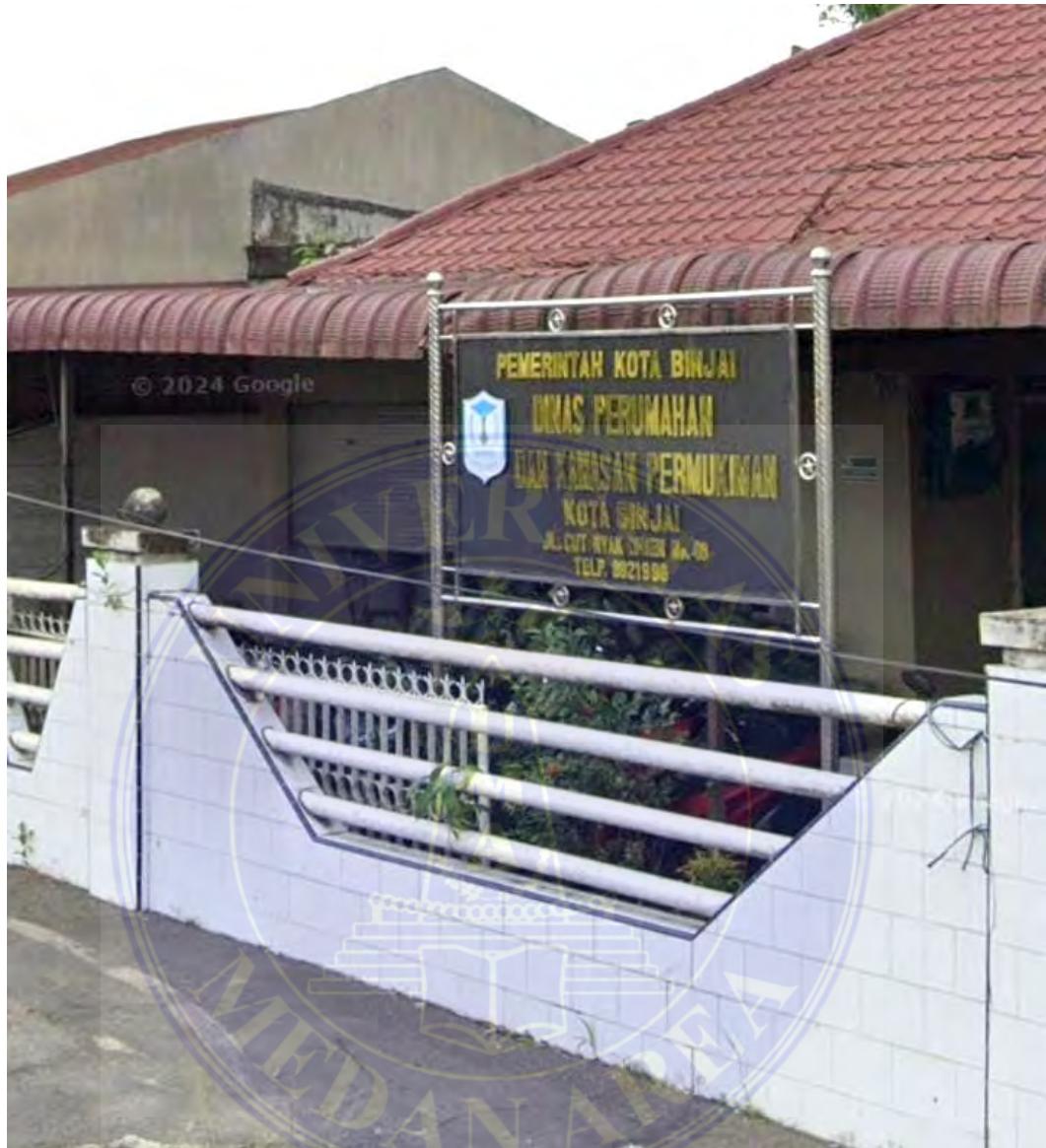
LAMPIRAN B

DOKUMENTASI



Gambar 1. Informan Utama.

*Bapak Eddy Sinaguliang. Pengawas Tata Bangunan Bidang Perumahan Dinas
Perumahan dan Kawasan Pemungkiman*



Gambar 2. Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



Gambar 3. Anggota BSPS di Kantor Dinas Perumahan di Kota Binjai



Gambar 4. Kantor Kepala Desa Purwobinangun Kabupaten Langkat



selaku Sekretaris Kepala Desa Purwobinangun dan Ibu Jelita selaku Bendahara Kepala Desa Purwobinangun.



Gambar 6. Informan Tambahan.

Bapak Prewin Sukbakti selaku masyarakat penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya



Gambar 7. Ibu Marmiayan Ginting selaku masyarakat penerima bantuan BSPS



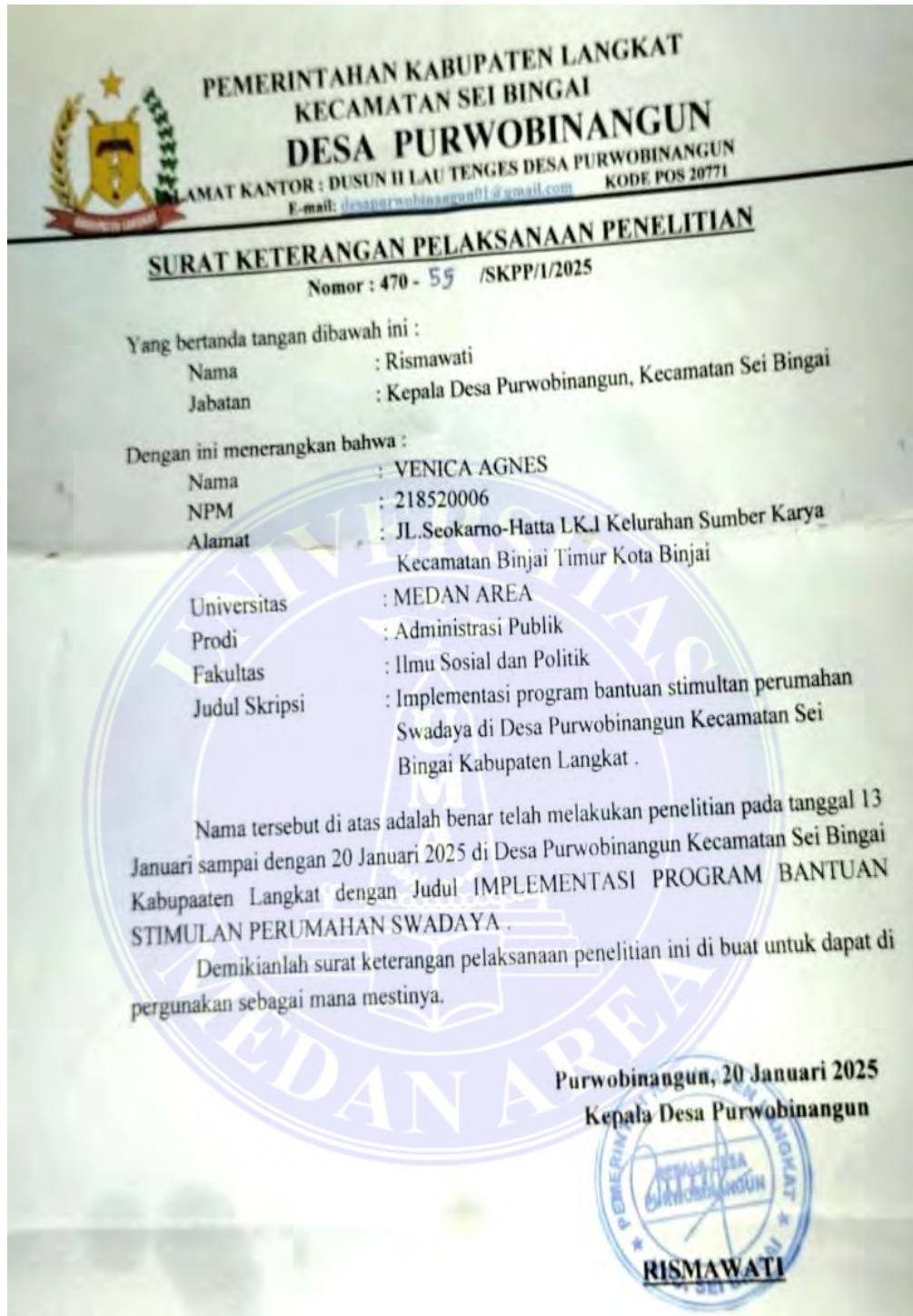
Gambar 8. Ibu Pariyana selaku masyarakat penerima bantuan BSPS



Gambar 9. Program BSPS di Kota Binjai dan Kabupaten Langkat



Gambar 10. Surat Pengantar Penelitian



Gambar 11. Surat Balasan Penelitian